

MEMPERKUAT KELEMBAGAAN EKONOMI PERDESAAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING KOMODITAS STRATEGIS WILAYAH

Sahat M. Pasaribu

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, berbagai upaya pemerintah telah dan terus dilakukan untuk menggali, mengembangkan dan memperkuat daya saing produk-produk industri berbasis pertanian di seluruh Indonesia. Berbagai peraturan dan kebijakan juga telah digulirkan agar iklim usaha semakin kondusif, khususnya bagi para pelaku usaha di tingkat produksi, dan dengan penyediaan fasilitas yang semakin memadai dan beragam, seperti fasilitas pembiayaan. Daya saing produk agro-industri Indonesia dituntut dan harus dipacu untuk mampu menghadapi serbuan berbagai produk sejenis yang berasal dari luar negeri, khususnya pada saat berada dalam pasar tunggal ASEAN yang akan berlaku mulai Januari 2016. Pelaku industri di dalam negeri diminta untuk mempersiapkan diri karena semua aturan ekonomi akan terintegrasi dan diberlakukan sama pada semua negara anggota (Bisnis Indonesia, 2012). Pasar tunggal akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang ditandai dengan kebebasan arus barang, jasa, investasi, termasuk pekerja terampil dan arus modal yang lebih leluasa karena penghapusan berbagai macam hambatan/peraturan.

Terkait dengan semua upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka memperkuat industri kecil dan menengah, termasuk industri berbasis pertanian menghadapi pasar global, maka perlu diketahui, dikaji, dan disiapkan kemampuan sentra-sentra produksi agro-industri yang belum tertangani di wilayah-wilayah yang memiliki potensi pengembangan di Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut termasuk daerah perbatasan dengan negara lain yang selama ini belum mendapatkan sentuhan pengembangan yang memadai.

Justifikasi yang mendasari pentingnya kajian ini tidak terlepas dari keinginan untuk mempersiapkan wilayah NKRI terluar/wilayah perbatasan yang memiliki potensi pengembangan industri berbasis pertanian untuk meraih manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Di satu pihak, kearifan lokal yang sudah terbentuk dan berkembang di wilayah perbatasan yang memiliki potensi pengembangan agro-industri perlu dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penghasilan dari kekuatan sendiri secara berkesinambungan. Pemerintah Indonesia bertekad untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Sementara di lain pihak, sesuai dengan kesepakatan para pemimpin negara sekawasan di Asia Tenggara bahwa terbentuknya pasar tunggal di kawasan negara-negara ASEAN bagi produk-produk pertanian akan meningkatkan daya saing produk sejenis sehingga memerlukan berbagai pembaruan agar memiliki kemampuan berkompetisi secara terus-menerus. Harus dipahami bahwa saat ini masih banyak produk pertanian strategis yang perlu ditingkatkan kualitas dan daya saingnya, khususnya produk agro-industri di wilayah perbatasan, agar mampu menembus pasar internasional dan bersaing dengan produk yang sama yang berasal dari negara lain.

Daya saing produk pertanian dan kebijakan yang mendukungnya belum sepenuhnya mendorong kekuatan untuk memasuki pasar global. Dalam kaitan ini, potensi dan kelemahan yang dihadapi menjadi sangat penting untuk diidentifikasi serinci mungkin, sementara kesempatan dan ancaman yang memengaruhi keberhasilan produk pertanian yang bersangkutan perlu didorong untuk merebut pasar yang tersedia. Permintaan produk pertanian berkualitas diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan penduduk dan kemampuan ekonomi masyarakat. Produk agro-industri diduga akan semakin banyak dan beragam karena dimungkinkannya peluang pasar bagi produk tersebut pada



kawasan yang lebih luas. Dalam konteks ini, ketersediaan bahan baku dan daya saing produk menjadi kata kunci untuk menghasilkan produk strategis. Dengan bebasnya arus barang keluar dan masuk ke pasar di kawasan Asia Tenggara, maka kekuatan daya saing harus cukup lentur untuk bertahan dan atau meningkatkan kekuatan di pasar. Fasilitas yang disediakan pemerintah dengan kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak swasta dengan petani/pengolah bahan baku hasil pertanian diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru di perdesaan, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, membuka pasar yang lebih luas dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat penghasil produk berbasis pertanian di wilayah perbatasan NKRI.

Inisiatif mengembangkan wilayah perbatasan dinilai tepat dilaksanakan saat ini dengan mempertimbangkan pemanfaatan kearifan lokal untuk meningkatkan daya saing dan peluang pasar produk pertanian. Tulisan ini menggali informasi tentang pengembangan produk pertanian strategis di wilayah perbatasan NKRI dengan pendekatan kemitraan. Tulisan ini juga menyajikan strategi penyiapan pengembangan sumber daya ekonomi wilayah menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha, khususnya pada level masyarakat produsen di perdesaan.

Dengan deskripsi diatas, secara umum, tujuan memperoleh informasi dan pengetahuan tentang sentra produk pertanian strategis di wilayah perbatasan yang dapat dikembangkan karena memiliki potensi untuk mencapai taraf yang menguntungkan. Secara khusus, tulisan ini bertujuan untuk (a) mendeskripsikan pendekatan kemitraan yang layak dikembangkan pada sektor pertanian di wilayah-wilayah perbatasan dan (b) mengidentifikasi produk pertanian strategis untuk menghasilkan produk agro-industri yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

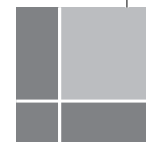
PENGEMBANGAN AGRO-INDUSTRI DENGAN PENDEKATAN KEMITRAAN

Konsep One village One Product (OVOP)

Pengembangan produk pertanian menurut konsep Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product/OVOP*) dimaksudkan sebagai pendekatan yang digunakan dengan menggerakkan masyarakat agar memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya dalam kegiatan pengembangan produk pertanian. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri serta kebanggaan terhadap kemampuan dan daerahnya.

Pendekatan OVOP merupakan pendekatan "pembangunan dari dalam" (*endogenous development*) yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan wilayah di suatu daerah dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi yang bersumber secara lokal. Sumber daya lokal ini menjadi modal dasar yang digunakan dan dipelihara secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip dasar dari Pendekatan OVOP adalah (Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, 2009):

- a. Merupakan produk lokal yang mampu menembus pasar global (*local yet global*): Mengupayakan potensi lokal untuk meraih reputasi global dengan merevitalisasi potensi masing-masing daerah untuk mengembangkan sumber daya lokal dan memacu kreativitas produk yang spesifik/unik, perpaduan antara potensi, kearifan dan budaya lokal, bernilai tambah tinggi, memiliki standar pasar internasional, disukai secara lokal namun dapat diterima di pasar internasional, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- b. Memiliki kemandirian dan kreativitas (*self reliance and creativity*): Penggerak utama yang menjadi kekuatan gerakan OVOP adalah masyarakat sendiri yang melakukan kegiatan secara mandiri dengan kreativitas, inovasi, ketekunan, dan potensi sumber



daya, serta pengetahuan yang berasal dari masyarakat tersebut. Pemerintah memberikan dukungan dan fasilitasi serta kemudahan lainnya melalui advokasi teknis, mediasi, pedoman teknis cara memproduksi yang baik, membantu mengembangkan produk supaya lebih menarik, membantu menerapkan teknologi dan metoda baru, standardisasi, dan informasi tentang potensi dan akses pemasaran.

- c. Pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*): Dengan motivasi tinggi, pengembangan SDM diarahkan untuk mentransformasikan tantangan menjadi peluang di berbagai sektor di daerah masing-masing. Para pelaku berusaha sekuat tenaga dan tidak menyerah menggali teknologi dan inovasi baru yang bersumber dari potensi daerah serta tidak kecewa karena kegagalan usaha, namun terus berupaya membuka kesempatan ekonomi yang lebih baik.

Pendekatan OVOP di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan satu produk berkelas global yang unik dan khas daerah yang diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Satu desa sebagaimana dimaksud diatas dapat diperluas menjadi kecamatan, kabupaten/kota maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha ekonomis. Dengan demikian, ciri khas produk OVOP Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Berpangkal dari potensi/kekayaan sumber daya alam sesuai dengan kondisi geografi daerah.
- b. Bersumber dari tradisi dan kearifan lokal dengan talenta dan ketrampilan turun-temurun menurut seni budaya setempat.
- c. Mempunyai keindahan tersendiri atau memiliki cita rasa, selera dan kelezatan yang khas.
- d. Didasarkan atas daya kreasi seni dan inovasi teknologi masyarakat setempat (wirausaha, seniman, pelajar/mahasiswa, industriawan atau praktisi).

Strategi pelaksanaan pendekatan OVOP dapat dilakukan dengan memegang inisiatif sebagai berikut:

- a. Melakukan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat lokal.
- b. Memanfaatkan pengetahuan, tenaga kerja dan sumber daya lokal yang memiliki keunikan khas daerah.
- c. Mengutamakan perbaikan mutu dan penampilan produk.
- d. Meningkatkan promosi dan pemasaran secara aktif, baik pada tingkat nasional maupun global.
- e. Diutamakan bagi perusahaan kecil dan menengah yang menghasilkan produk terbaik yang kualitas dan akses pasarnya masih dapat ditingkatkan, baik nasional maupun global.

Motor penggerak untuk melaksanakan pengembangan produk pertanian dengan pendekatan OVOP adalah:

- a. Masyarakat Lokal: Memanfaatkan kearifan lokal dan keahliannya untuk merancang, menciptakan, dan memproduksi serta mengembangkan produk lokal yang unik, bernilai tambah tinggi, dan yang mendapatkan pengakuan standar internasional.
- b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah: Mendukung, mendorong dan memfasilitasi program melalui dukungan kebijakan, kegiatan riset, dan pengembangan SDM serta promosi dan pemasaran.
- c. Sektor Swasta: Berpartisipasi aktif mendukung kegiatan sesuai bidang dan kemampuannya dalam pengembangan SDM, produksi dan distribusi pemasaran.



Produk pertanian yang dikembangkan dalam program ini adalah produk-produk yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan unggulan daerah dan/atau produk kompetensi inti daerah.
- b. Unik, memiliki keaslian dan kekhasan budaya lokal.
- c. Bermutu baik dan berpenampilan menarik.
- d. Berpeluang memasuki pasar domestik dan ekspor.
- e. Diproduksi secara konsisten dan berkesinambungan.

Produk khas lokal diharapkan berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru dengan memanfaatkan modal dasar yang berbasis pada sumber daya alam, sesuai dengan kondisi geografis, mencerminkan tradisi dan budaya setempat, dan diproduksi menurut kemampuan ketrampilan seni tradisional.

Kunci sukses keberhasilan penerapan program ini adalah upaya pengembangan karakter yang dilakukan secara terus menerus, yakni dengan:

- a. Membangun kesadaran masyarakat lokal tentang potensi diri mereka dan sumber daya yang ada di daerahnya.
- b. Memberikan pemahaman tentang harta karun yang terpendam dalam bentuk potensi sumber daya, budaya, kearifan lokal, dan tradisi yang dikaruniakan Tuhan pada daerahnya.
- c. Menanamkan komitmen untuk tidak cepat putus asa dalam upaya pemberdayaan daerahnya.
- d. Meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat untuk memproduksi produk-produk khas daerahnya, sesuai selera dan standar pasar internasional, yang bernilai tambah tinggi.
- e. Mengamankan jaringan pemasaran dan jalur distribusi penjualan.
- f. Meningkatkan wawasan, keterampilan dan pengetahuan masyarakat sebagai sumber daya manusia daerah yang secara langsung terlibat dalam pengembangan daerahnya.

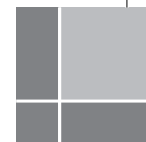
Keberhasilan penerapan pendekatan OVOP untuk mengembangkan produk pertanian di suatu wilayah sangat banyak ditentukan oleh kemampuan SDM yang tersedia secara lokal. Untuk itu, peningkatan ketrampilan dan kemampuan SDM perlu terus dilakukan melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas SDM, berupa pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding dan inkubasi. Dalam kaitan ini, diperlukan adanya dukungan dan bantuan pemerintah (instansi terkait) secara terkoordinasi dan berkesinambungan.

Pendekatan Kawasan dan Kearifan Lokal

Permentan No.50/2012 tentang pengembangan kawasan pertanian mengamankan pengembangan komoditas pertanian strategis dengan pendekatan kawasan. Pengembangan kawasan pertanian terfokus pada komoditas strategis lokal diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan produk strategis setempat, mampu meningkatkan kinerja usahatani dan daya saing produk yang dihasilkan, dan dapat mendorong perputaran ekonomi wilayah secara signifikan.

Pengembangan pertanian berbasis kawasan diharapkan dapat mengatasi berbagai kelemahan yang dihadapi para pemangku kepentingan, khususnya petani dan pengambil keputusan di daerah. Diantara banyak kelemahan tersebut adalah (Irawan, 2015):

- a. Fakta bahwa perencanaan pembangunan pertanian bersifat jangka pendek dan tahunan, top down, kurang didukung oleh data yang dapat dipercaya (*reliable*), dan dengan pembangunan pada lahan sempit dan tersebar. Pengembangan



kawasan untuk sektor pertanian menggunakan data statistik dan data tata ruang, rentang waktu 3-5 tahun dengan kegiatan terkonsentrasi, cakupan yang relatif luas sesuai dengan perencanaan pembangunan wilayah menurut RTRW setempat.

- b. Pendekatan pengembangan komoditas pertanian dilaksanakan sebagian pada aspek-aspek pertanian, dan secara khusus pada komoditas tertentu. Pengembangan pertanian berbasis kawasan bersifat holistik dari hulu ke hilir dan terintegrasi khususnya dengan ternak.
- c. Integrasi program diantara kegiatan eselon satu pada Kementerian Pertanian tampaknya masih lemah dalam pelaksanaan di lapangan, terutama jika dikaitkan dengan kegiatan antar sektor. Pembangunan pertanian berbasis kawasan diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai program yang disesuaikan pada fokus pembangunan pertanian di masing-masing wilayah.
- d. Pembangunan pertanian di daerah sangat tergantung pada ketersediaan pendanaan dari pusat (APBN) dengan sedikit sumbangan yang berasal dari dana daerah (APBD) dengan peran serta masyarakat setempat. Mengingat keterbatasan dana yang tersedia secara nasional (APBN), maka pembiayaan yang berasal dari APBD bersama-sama dengan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mendorong pembangunan pertanian berbasis kawasan di daerah-daerah.

Konsep dasar pengembangan kawasan pertanian untuk komoditas strategis setempat adalah kombinasi hubungan fungsional antara pusat produksi komoditas dengan faktor-faktor alam, sosial, dan budaya masyarakat setempat dan ketersediaan infrastruktur pertanian mengingat sempitnya lahan usaha pertanian untuk mencapai tingkat manajemen pengembangan kawasan yang efisien. Komoditas strategis wilayah memiliki karakteristik tersendiri, spesifik lokasi, dan umumnya terdapat pada setiap kawasan/wilayah menurut batas administratif wilayah.

Menurut tata pengelolaan wilayah, kawasan pertanian dapat diklasifikasikan sebagai (a) Kawasan pertanian nasional, (b) Kawasan pertanian tingkat provinsi, dan (c) Kawasan pertanian tingkat kabupaten/kota. Menurut komoditasnya, kawasan pertanian dapat dikelompokkan kedalam (a) kawasan tanaman pangan, (b) kawasan hortikultura, (c) kawasan tanaman perkebunan, dan (4) kawasan peternakan. Terdapat 40 komoditas pertanian yang diidentifikasi dan masuk kedalam kelompok komoditas strategis seperti disajikan dalam tabel berikut.

Pengembangan kawasan pertanian terdiri dari 2 (dua) pola, yaitu: Pertama, pola pengembangan yang selama ini telah dilaksanakan. Pola ini diorientasikan untuk memperluas kawasan produksi dan memperkuat rantai agribisnis secara optimal. Pola yang mempertahankan kondisi pertanian saat ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan kawasan/wilayah disekitarnya (*trickle-down effect*). Kedua, pola pengembangan model baru. Pola pengembangan pada kawasan yang baru dibuka ini mempunyai dua target, yakni (a) memperluas skala usaha dan melaksanakan kegiatan yang belum selesai dan (b) mengembangkan kawasan baru yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan secara bertahap dapat mencapai skala pengembangan minimum pada wilayah tersebut.



Tabel 1. Komoditas Strategis Nasional

Kelompok komoditas	Pangan	Non-pangan
Tanaman pangan	Padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu, ubijalar	-
Hortikultura	Cabai, bawang merah, kentang, manga, nenas, jeruk, durian, manggis, salak	Rhizome dan tanaman hias (anggrek, krisan, jasmine)
Tanaman perkebunan	Kelapa sawit, kelapa, coklat, kopi, lada, jambu mete, teh, tebu	Karet, kapas, tembakau, cengkeh, jatropa, patchouli, candlenut
Peternakan	Daging sapi, susu sapi, kerbau, kambing/domba, babi, ayam kampung, itik/bebek	-

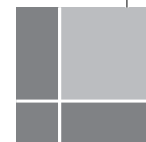
Pendekatan pengembangan kawasan dirancang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan berusaha tani, mendorong efisiensi pembiayaan, dan mendukung kesinambungan usahatani komoditas strategis di wilayah yang bersangkutan. Empat pendekatan untuk mengembangkan komoditas strategis kawasan adalah (a) agro-ekosistem, (b) agribisnis, (c) partisipasi, dan (4) terintegrasi.

Sebagaimana diusulkan oleh kalangan swasta, strategi umum untuk pengembangan kawasan pertanian terdiri dari tujuh upaya, yakni: (a) memperkuat perencanaan pembangunan wilayah, (b) mendorong penguatan kolaborasi dan kemitraan, (c) meningkatkan pembangunan infrastruktur, (d) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, (e) memperkuat kelembagaan, (f) mempercepat adopsi teknologi, dan (g) mengembangkan pengolahan (komoditas strategis) di industri hilir.

Pengembangan pertanian berbasis kawasan memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan pengembangan yang dilaksanakan saat ini yang lebih ditekankan pada pembangunan usahatani berukuran kecil dan tersebar. Untuk mencapai kegiatan yang efisien dan efektif, pembangunan wilayah memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan, khususnya pejabat eselon satu di Kementerian Pertanian. Dukungan Badan Litbang Pertanian menjadi sangat penting khususnya dalam hal penyediaan inovasi dan teknologi pertanian, perencanaan program berdasarkan data statistik dan data tata ruang, serta model efektif untuk pengembangan pertanian berbasis kawasan.

Public Private Partnership (PPP)

Pembangunan pertanian perlu dibangun dengan kesungguhan semua pihak dan kesungguhan ini harus diperlihatkan pada berbagai bentuk kerjasama. Kerjasama yang didukung oleh semua kemampuan yang dimiliki masing-masing pihak yang bekerjasama (khususnya antara pemerintah dengan pihak swasta) akan bersinergi untuk menghasilkan output yang saling menguntungkan. Di sektor pertanian, pola kerjasama seperti ini disebut kemitraan antara pihak swasta dengan pemerintah yang dilaksanakan oleh petani (lazim disebut *public-private partnerships/PPP*). Publik (*public*) dalam konteks ini bermakna bahwa masyarakat (swasta) bersama pemerintah bekerjasama atau bermitra dalam posisi yang seimbang dan saling menghormati untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masing-masing pihak. PPP merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam pembangunan pertanian.



PPP adalah suatu mekanisme kerjasama yang dijalankan oleh pemerintah dengan sektor swasta dengan cara berbagi sumber daya, pengetahuan, dan risiko dalam rangka peningkatan efisiensi produksi dan distribusi produk dan jasa hingga menghasilkan berbagai manfaat (Frank *et al.*, 2007). Kemitraan membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya. Model aplikasi PPP di sektor pertanian memiliki tujuan yang secara signifikan sejalan dengan pola pelaksanaannya oleh para pelaku kerjasama tersebut. Namun demikian, Umali-Deiningner (1997) menyatakan bahwa 'mitra' bisa saja menjadi 'lawan' pada saat kemiraan ini menyangkut bisnis dan keuntungan finansial. Hasil kajian di India, sebagaimana dilaporkan oleh Ponnusamy (2013), dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan di sektor pertanian memperlihatkan perlunya landasan faktor kepercayaan, keterbukaan, dan kepatuhan pada kesepakatan (sesuai perjanjian). Untuk menanggulangi hal-hal tersebut diatas, mekanisme kerja yang sesuai dan didukung oleh berbagai kebijakan dan instrumen yang tepat sangat diperlukan. Sebagaimana dilaporkan Calesteus (2012), kondisi yang sama juga ditemui Afrika. Informasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan, namun secara umum PPP yang dilaksanakan di sektor pertanian membutuhkan partisipasi positif dari semua pihak yang terlibat didalamnya dengan koordinasi pemerintah yang menyediakan faktor-faktor pendukung untuk mendorong kerjasama ke arah kinerja yang lebih baik.

PPP mengurangi biaya produksi dan risiko usaha pada setiap mata rantai kegiatan yang dilaluinya. PPP meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan sesuai dengan pemanfaatan teknologi yang digunakan. PPP juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses yang dilakukan serta menaikkan daya saing produk dan aksesibilitas pemasarannya. Dengan demikian, PPP akan meningkatkan manfaat yang diterima kedua belah pihak yang saling bekerjasama, khususnya peningkatan pendapatan (petani), keuangan (modal kerja), dan alih pengetahuan (ilmu/ketrampilan). Dengan sifat PPP yang diikat oleh kerjasama yang mengikat, baik di tingkat pusat maupun di daerah, maka kapasitas (keahlian, teknologi, manajemen) dan sumber daya yang tersedia pada pemerintah (organisasi publik) dan lembaga/sektor swasta dengan risiko dan keuntungan yang dapat diraih akan dibagi bersama dalam pemanfaatan jasa/fasilitas yang ada (Kapoor, 2007).

International Fund for Agricultural Development (2003) membagi tiga tipe dasar model PPP, yaitu: (a) Pengaturan kontrak secara formal (*formal contractual arrangements*). Perusahaan-perusahaan swasta bekerja sama dengan produsen kecil (petani kecil) menurut variasi pengaturan kontraknya, seperti skema kontrak antara petani atau pemilik lahan dengan perusahaan (*outgrower schemes*) atau kontrak usahatani atau kontrak antara produsen/petani dengan pembeli/perusahaan (*contract farming*) pada satu periode tertentu; (b) Pendelegasian fungsi mata rantai nilai (*value chain*) tertentu kepada organisasi produsen. Perusahaan swasta mendelegasikan manajemen pusat pengolahan yang dimiliki produsen kepada organisasi-organisasi usaha/produsen kecil; dan (c) Usaha bersama antara perusahaan swasta dengan kelompok-kelompok usaha kecil. Sebuah perusahaan baru dapat didirikan dan dimiliki bersama oleh kelompok usaha/produsen dengan perusahaan swasta jika melaksanakan sebagian aktivitas usaha (seperti pengolahan) atau keseluruhan aktivitas usaha (*whole value chain*).

Dalam PPP, sektor swasta juga membantu petani memperluas akses terhadap teknologi dan mengarahkan mereka agar berorientasi pada pasar. Sektor swasta dengan petani terlibat secara langsung dalam alih teknologi dan atau alih dukungan keuangan dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Keterkaitan dalam kegiatan kemitraan tersebut harus memiliki banyak sasaran. Pengalaman menunjukkan bahwa program PPP yang berlangsung saat ini mampu meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran produk bersama yang dihasilkan atas kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam ikatan kemitraan tersebut. Kerjasama yang erat yang sengaja didesain antara pemerintah dengan sektor swasta dalam berbagai bentuk selalu



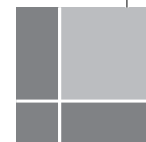
didasarkan atas keinginan untuk memperoleh manfaat secara bersama-sama. Lebih jauh lagi, kerjasama ini juga dirancang untuk memperbaiki kinerja usaha pertanian dan mendorong kegiatan ekonomi yang lebih kompetitif, khususnya dalam upaya menguasai pasar produk pertanian di dalam negeri ditengah persaingan regional sejak mulai diberlakukannya pasar tunggal ASEAN.

Sektor pertanian selalu berhadapan dengan risiko (mengalami kegagalan) dan belakangan ini, sektor pertanian juga dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, tetapi sekaligus merupakan peluang dalam kaitan anomali iklim. Iklim ekstrim yang sulit diprediksi menjadi penghalang bagi kegiatan pengembangan usaha pertanian, khususnya usahatani padi. Berbagai jenis tanaman budidaya sulit diharapkan dapat berproduksi secara optimal, sehingga petani dihadapkan pada risiko kerusakan tanaman yang berujung pada kerugian. Di tengah tantangan tersebut, peluang mengoptimalkan berbagai potensi yang tersedia menjadi terbuka dan dapat diberdayakan untuk meningkatkan produksi berbagai produk pertanian.

Risiko tinggi yang dihadapi sektor pertanian selalu membayangi terjadinya kegagalan panen karena kondisi iklim yang sulit diprediksi. Dalam kondisi seperti ini, petani akan menghadapi kesulitan untuk memperoleh modal berusaha. Oleh karena itu, jika petani mengalami gagal panen, maka modal kerja untuk pertanaman berikutnya akan diperoleh karena partisipasinya dalam asuransi pertanian. Untuk mempermudah petani menyediakan biaya premi asuransi, maka kedepan telah dirancang agar setiap peminjaman yang dilakukan petani dari bank, maka biaya untuk premi asuransi akan diintegrasikan pada paket kredit yang diajukannya. Dengan cara ini, petani tidak perlu mengeluarkan uang tunai untuk membayar premi (Pasaribu, 2010). Hasil kajian Dick dan Wang (2010) juga senada dengan pernyataan diatas dengan penekanan bahwa skema asuransi semakin diminati karena keinginan meningkatkan manajemen risiko usahatani dan sekaligus dapat mendorong investasi di sektor pertanian.

Melalui sosialisasi penerapan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim, perbaikan infrastruktur pertanian, perluasan areal pertanaman, sistem irigasi yang efisien, dan manajemen usahatani yang lebih baik, peluang meningkatkan produksi beberapa komoditas pertanian menjadi sangat terbuka. Hal inilah yang memberi keyakinan bahwa ditengah tantangan berat perubahan iklim global, produksi beras, misalnya diharapkan dapat meningkat. Sementara itu, pada waktu yang akan datang produksi berbagai komoditas bernilai ekonomi tinggi lainnya, seperti jagung, kedele, bahkan gula maupun daging sapi diharapkan dapat meningkat mencapai target peningkatan produksi yang direncanakan. Dari hasil peningkatan produktivitas komoditas pertanian, peluang menghasilkan energi menjadi sangat relevan untuk dikembangkan. Integrasi produk pertanian dan energi patut diduga dapat memberikan kesempatan bagi petani dan masyarakat perdesaan untuk memanfaatkannya menjadi peluang ekonomi yang mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus tersedia dalam berbagai bentuk dan difokuskan pada upaya pengembangan sistem pertanian-energi diatas. Rusastra *et al.* (2010) dalam kajiannya untuk merespon krisis energi menekankan bahwa efektivitas kebijakan ketahanan pangan ditentukan oleh pemahaman dan adaptasi dampak dan kebijakan global krisis pangan-energi-finansial. Kajian ini juga menyimpulkan bahwaantisipasi kebijakan global untuk merespon krisis pangan-energi-finansial adalah dengan mengembangkan pertanian skala kecil dalam perspektif pertumbuhan dan pemerataan.

Mengingat sumber pembiayaan yang berasal dari APBN/APBD semakin terbatas, maka diperlukan kreativitas petani atau kelompok masyarakat lainnya memanfaatkan dana yang terbatas tersebut untuk memberikan hasil yang dapat dinikmati bersama. Salah satu diantara kreativitas ini adalah terbangunnya hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam format kegiatan kemitraan. Purnaningsih (2007)



menekankan pentingnya peningkatan mutu produk agribisnis, efisiensi usaha, serta kerjasama pemerintah dengan swasta dalam rangka membangun kemitraan agribisnis berkelanjutan.

Aplikasi pola kemitraan di sektor pertanian memperlihatkan dampak positif, baik bagi petani maupun dalam kinerja usaha pertanian. Diantara manfaat yang dinikmati petani adalah: (a) Meningkatnya keuntungan/penerimaan; (b) Dihasilkannya produk yang berdaya saing; (c) Diperolehnya kredit berbunga rendah; dan (d) Terbaginya pengalaman bisnis dengan perusahaan besar dan saling menikmati keuntungan.

Petani yang terlibat dalam pola kemitraan memperoleh keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana ditampilkan dalam gambar di atas, para petani (plasma) mengadopsi teknologi baru dan dengan bantuan perusahaan mitranya, mampu meningkatkan manajemen usahatani. Sementara itu, perusahaan besar (inti) juga terbantu oleh kontribusi petani yang secara teratur menghasilkan dan mengirimkan bahan baku dan atau produk usahatani yang dibutuhkan kepada perusahaan besar. Perusahaan besar, dengan demikian pasti memperoleh manfaat atas kemitraan ini.

Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan besar (swasta atau BUMN) yang saat ini sangat banyak membantu petani kecil disalurkan melalui pola kemitraan seperti digambarkan di atas. Dana CSR disalurkan dalam bentuk kredit berbunga rendah untuk kegiatan agribisnis atau agro-industri. Dana ini merupakan sumber keuangan yang baru bagi petani yang melakukan pengolahan atas produk usahatannya. Usaha-usaha pertanian kecil dapat mengajukan usulan untuk memperoleh dana ini dari perusahaan besar, termasuk usaha pertanian-energi yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Sebagai sumber keuangan alternatif untuk membiayai kegiatan di sektor pertanian, dana CSR telah berhasil membantu berbagai usaha kecil, tidak hanya di sektor pertanian, tetapi bahkan lebih besar lagi di sektor industri dan sektor perdagangan. Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) yang digagas Kementerian BUMN sebenarnya telah memberi harapan sebagai salah satu solusi mengatasi terbatasnya dana pembangunan pertanian yang berasal dari APBN dan APBD. Program GP3K umumnya bersumber dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) perusahaan BUMN yang merupakan bagian dari implementasi program CSR dan manfaatnya telah dirasakan petani (Biro Perencanaan, 2012).

Ditengah kebutuhan modal untuk petani dan usaha pertanian yang dilaksanakannya, dana CSR menjadi sangat relevan untuk disediakan sebagai modal kerja usaha/bisnis pertanian. Pemerintah perlu melihat ketersediaan dana yang besar ini untuk dikelola dalam satu manajemen keuangan khusus untuk kebutuhan pendanaan usaha pertanian/agribisnis pada masa pembangunan pertanian saat ini.

Kegiatan pengolahan hasil pertanian yang berorientasi bisnis dan menghasilkan nilai tambah (*added value*) dari komoditas yang dikelolanya perlu didorong untuk memperluas usaha, namun tetap menjaga mata rantai nilai yang positif. Perencanaan peningkatan produk pertanian yang berdaya saing dipandang relevan dengan pengembangan pola PPP. Peningkatan produk pertanian berdaya saing yang tinggi membutuhkan dana yang relatif murah sehingga dapat dijangkau para pelaku usaha kecil di sektor pertanian. Dana CSR dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kekuatan pasar produk pertanian dalam negeri. Oleh karena itu, dengan komitmen pemerintah, pelaksanaan PPP harus dapat difasilitasi dengan: (a) Pengembangan kebijakan (peraturan yang relevan, konsisten, dan harmonis); (b) Ketersediaan sumber daya yang mapan (termasuk kegiatan penyuluhan langsung oleh para penyuluh); dan (c) Peningkatan pemanfaatan modal usaha (cakupan yang lebih luas dari Program CSR).

Peran PPP sangat signifikan untuk membantu petani melindungi kegiatan usahatani. Dukungan PPP pertanian yang mengembangkan kerjasama dalam bentuk dan pola yang lain, termasuk pertanian-energi akan sangat membantu upaya pemerintah dalam pembangunan



pertanian nasional. Dengan pembagian tanggungjawab yang jelas dengan sifat keterbukaan dalam menjalankan kegiatan, PPP dapat memberikan insentif bagi semua pihak yang terlibat. Namun, perlu dipahami bahwa untuk mendapatkan mitra kerja yang sesuai, tepat, dan saling terbuka tidaklah mudah dan akan menjadi lebih sulit lagi jika dikaitkan dengan cara mencapai tujuan sambil mentransfer teknologi dan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ditengah upaya mempertahankan daya saing komoditas yang dihasilkan pada pasar yang semakin kompetitif. Pertanyaan semacam ini harus menjadi perhatian dan perlu mendapat pemecahan yang saling menguntungkan semua pihak diatas.

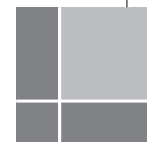
Harus diakui bahwa tidak selamanya model kemitraan di sektor pertanian selalu memberikan keuntungan. Ferroni dan Castle (2011) menyebutkan bahwa penentuan mitra adalah hal yang sangat penting dalam menjalin kerjasama. Setiap usaha menjalin kemitraan adalah upaya percobaan karena bekerjasama dengan pihak lain, mencoba menggabungkan berbagai keinginan disamping penyesuaian-penyesuaian dalam teknologi dan tujuan. Dalam konteks ini, menggabungkan budaya kerja antar perusahaan yang bermitra dinilai juga sangat penting. Lebih jauh, komunikasi yang intensif antara petani dengan peneliti dapat memberikan hasil nyata dalam berproduksi. Pengalaman melakukan penelitian di Fergana Valley (Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan) dengan pendekatan komunikasi kelembagaan dua arah (*a 'farmer-centric' innovative institutional mechanism*) berhasil mengefektifkan penyebarluasan informasi dalam meningkatkan produktivitas air pada tingkat usahatani.

PPP sudah lama dipraktekkan di Indonesia pada banyak komoditas pertanian. Pola inti-plasma, misalnya sudah lama dikenal dan dilaksanakan di sub-sektor perkebunan, misalnya kelapa sawit. Kerjasama antara perusahaan besar dengan petani untuk menghasilkan komoditas kentang atau sayuran lainnya juga banyak terdapat di berbagai sentra produksi sayuran. Pada sub-sektor peternakan, kegiatan penggemukan atau memelihara sapi perah di lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara terintegrasi juga dilaksanakan oleh para peternak di berbagai daerah. Selanjutnya, kerjasama antara perusahaan/pabrik dengan petani kedelai hitam sebagai bahan baku industri (industri kecap) juga ditemui di daerah. Inilah beberapa pola kemitraan yang populer di Indonesia saat ini. Kedepan, perlu digalakkan kemitraan pertanian-energi untuk menghasilkan gas, ethanol, dan lain-lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman, PPP membutuhkan beberapa persyaratan untuk membangun suatu kerjasama yang berkesinambungan antara sektor swasta dengan petani/kelompok tani, termasuk dalam kemitraan pertanian-energi yang diharapkan mampu membangun sistem pertanian-energi terpadu untuk kemandirian pangan dan kesejahteraan petani: (a) Memiliki keinginan untuk mengikatkan diri dalam kemitraan bisnis; (b) Mampu menghasilkan produk berkualitas dan dapat diterima (sesuai standar yang berlaku); (c) Menunjukkan inisiatif terbuka dalam berkomunikasi dan berdialog; (d) Menghormati mitra kerja sebagai prinsip dasar dalam kemitraan; (e) Mematuhi semua perjanjian yang telah disepakati dalam bekerjasama; dan (f) Mengakui hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra.

PPP membuka kesempatan alih teknologi, pengolahan yang menghasilkan produk bermutu/memiliki daya saing, dan manajemen usaha yang lebih baik. Hasil dari kerjasama ini adalah produk berkualitas yang memenuhi standar yang ditetapkan dengan peluang pasar yang menguntungkan. Pola kemitraan inti-plasma dan pola sub-kontrak dinilai relevan untuk kerjasama kegiatan bisnis antara perusahaan besar/pemodal dengan petani/peternak/usaha kecil di sektor pertanian.

PPP diusulkan sebagai salah satu instrumen kebijakan pembangunan pertanian, khususnya terkait dengan skema sistem pertanian terpadu (*integrated farming systems*) yang berfokus pada pertanian-energi untuk kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Fasilitas yang disediakan pemerintah disarankan agar disesuaikan dengan kondisi wilayah pengembangan PPP setempat, menurut komoditas pangan yang akan dikembangkan, serta



mendorong partisipasi dan peran swasta untuk meningkatkan kualitas produk pertanian yang dihasilkan.

PRODUK PERTANIAN STRATEGIS WILAYAH

Produk Lokal Pisang Abaka di Kabupaten Kepulauan Talaud

Setiap wilayah memiliki kemampuan menghasilkan berbagai produk berbasis pertanian. Diantara produk agro-industri tersebut pasti ada yang bersifat strategis dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Analisis tentang kekuatan dan kelemahan produk ini terkait dengan bahan baku, proses produksi, dan pemasaran produk, serta pengembangannya sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan strategis, konsisten, dan berkesinambungan.

Salah satu produk industri berbasis pertanian yang terdapat di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, misalnya adalah serat pisang abaka. Komoditas ini dinilai paling prospektif dengan peluang pengembangan yang menguntungkan ditinjau dari berbagai aspek sosial ekonomi, seperti finansial/perdagangan, kesempatan kerja, pendidikan/pengembangan kearifan lokal, dan pergerakan ekonomi lokal.

Sentra produksi pisang abaka yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Sentra produksi serat pisang abaka di Desa Essang, Kecamatan Essang sudah ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Talaud dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berkembang dengan tingkat keaktifan kelompok petani dan perajin yang tinggi. Komoditas pisang abaka menghasilkan serat yang dapat diolah lebih lanjut menjadi, antara lain tali penambat kapal (*ship mooring rope*), serat halus (*fine fiber*) atau serat bubuk (*pulp fiber*) sebagai barang setengah jadi (*intermediate product*) untuk membuat kain, karpet, kertas, dan lain-lain. Serat pisang abaka memiliki peluang pasar yang besar dan masih sangat terbuka di dalam negeri atau untuk ekspor. Menurut kajian Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyebutkan bahwa permintaan dunia terhadap serat pisang abaka mencapai 600.000 ton per tahun. Meskipun demikian, permintaan tersebut baru terpenuhi sekitar 15% (90.000 ton per tahun) yang dipasok dari Filipina sebanyak 80.000 ton dan Ekuador sebanyak 10.000 ton (Mola, 2014).

Dengan informasi tersebut, pasar serat pisang abaka sangat terbuka dan memiliki peluang pemasaran yang besar. Oleh karena itu, komoditas ini sangat potensial untuk dikembangkan dan memiliki prospek yang menguntungkan bagi para petani atau perajin di wilayah perbatasan di bagian utara Provinsi Sulawesi Utara. Secara rinci, beberapa produk turunan serat pisang abaka dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Upaya Percepatan Pengembangan Produk Strategis

Pada puncak seluruh rancangan dan implementasi program dan kegiatan pengembangan produk pertanian strategis adalah dimilikinya komitmen dan keinginan politik (*political will*) serta keteladanan kepemimpinan (*leadership*). Percepatan pengembangan komoditas strategis pisang abaka di Kabupaten Kepulauan Talaud seperti dilaporkan menurut hasil kajian tentang pengembangan komoditas strategis di wilayah perbatasan mencakup (Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, 2014):



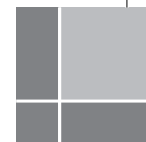
Tabel 2. Produk Turunan Serat Pisang Abaka

No	Produk
1	Produk pintal: Tali, <i>twins</i> , tali kapal, <i>binder</i> dan benang
2	Industri pulp dan kertas: Kantong teh, kertas saring, kertas stensil, <i>base tissue</i> , <i>base paper</i> dan bungkus sosis; Kertas rokok, kertas uang, kertas amplop, <i>time cards</i> , <i>boolbinders</i> dan kertas sembahyang; serta <i>Microglass</i> filter udara, <i>x-ray negative</i> , filter oli, vakum filter, dan lensa <i>optic wiper</i> .
3	<i>Nonwovens</i> : Masker dan pakaian modis, popok, kain dan seprei rumah sakit
4	<i>Fibers' crafts</i> : Tas, tempat tidur gantung, alas piring, karpet, dompet, <i>fishnet</i> dan keset sepatu
5	<i>Handmade paper</i> : Kertas lembaran, kertas tulis, macam2 kartu, kap lampu, bola, <i>dividers</i> , bingkai foto, tas, alas piring dan jam meja
6	Kantong sak, keranjang dan <i>furniture</i>
7	<i>Wall paper</i> dan <i>wall cover</i>
8	Lain-lain: Isolator kabel dan <i>automobile components/composites</i>

Sumber: Mola, 2014.

1. Penyediaan areal tanam skala ekonomis hingga 300 hektar untuk ekstensifikasi tanaman pisang abaka. Potensi areal pertanaman pisang abaka di wilayah ini mencapai sekitar 5.000 hektar dan Ibu Bupati menyanggupi penyediaan lahan hingga 5.000 hektar tersebut untuk mendorong penyediaan bahan baku.
2. Usulan agar Kecamatan Essang dijadikan sebagai pusat produksi industri/pusat pengolahan pisang abaka. Atas usulan ini, sudah diperoleh informasi bahwa kepala daerah (Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud) telah bertatap muka dengan Kelompok Masyarakat Sansiote (kelompok petani/perajin pisang abaka) di Desa Essang (akhir November 2014) dan menetapkan Kecamatan Essang sebagai sentra produksi pengembangan produk pisang abaka di Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Kesiadaan menggalang kerjasama antar instansi terkait di daerah dengan kontribusi masing-masing pemangku kepentingan. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah sepakat bahwa sinergi program antara pusat dan daerah harus dilaksanakan untuk menyambungkan sumber daya yang dialokasikan di pusat dengan sumber daya yang tersedia di daerah.

Respons positif dari kepala daerah seperti ini patut diapresiasi dan ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang nyata serta melibatkan semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, program uji coba kedepan diusulkan dapat segera dilaksanakan karena dinilai layak untuk mengawal pelaksanaan teknis dan operasional kegiatan, termasuk manajemen usaha untuk mengembangkan produk tanaman pisang abaka yang menghasilkan serat pisang abaka di Kabupaten Kepulauan Talaud. Tabel matriks (*action matrix*) yang operasional disusun



hingga ke bentuk yang mudah dicerna dan dapat/layak dilaksanakan. Pola kerjasama secara partisipatif menganut pola kemitraan (dengan pendekatan *public-private partnerships*) dari semua pihak yang terlibat didorong untuk mengambil bagian atas keseluruhan proses pelaksanaannya.

Pisang abaka memiliki prospek ekonomi yang cerah dengan permintaan yang cukup menggembirakan dari berbagai negara. UMKM Yogya (2014) melaporkan budidaya pisang abaka yang sederhana dengan potensi pasar yang luas. Hal senada juga diungkapkan oleh Thomas (2014) dalam laporannya tentang peluang bisnis serat pisang abaka, khususnya dari Provinsi Sulawesi Utara. Pisang abaka ternyata juga terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Kabupaten Simeulue, Provinsi NAD serta di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Banten (Tangerang) (Yuswiyanto, 2013; Marantina, 2013).

Selanjutnya, usulan prioritas telah diorientasikan pada produk pertanian strategis (serat pisang abaka) sebagai produk pertanian paling prospektif ditinjau dari aspek kesiapan pengembangan di wilayah perbatasan. Hasil kajian produk strategis ini mencakup:

1. Penentuan prioritas utama produk IKM strategis. *Teridentifikasi*: Pisang abaka untuk menghasilkan serat pisang abaka.
2. Penentuan sentra produk pertanian untuk menghasilkan produk antara atau produk/ barang jadi strategis. *Disepakati*: Kecamatan Essang, khususnya Desa Essang dan Desa Essang Selatan.
3. Penyediaan bahan baku sepanjang waktu. *Upaya*: (a) Perluasan areal tanam (budidaya) di wilayah yang memungkinkan program ekstensifikasi; dan (b) Pemeliharaan tanaman.
4. Pemberdayaan kapasitas sumber daya manusia. *Usulan*: (a) Pelatihan peningkatan keahlian dan ketrampilan kelompok perajin; dan (b) Kunjungan ke pusat pengolahan serat di wilayah lain.
5. Perbaikan proses produksi/teknik pengolahan/peningkatan mutu. *Saran*: (a) Penyediaan fasilitas peralatan/perlengkapan pengolahan untuk proses produksi secara efisien; dan (b) Pelatihan teknik berproduksi (pengolahan, pengemasan, pemintalan, dll).
6. Peningkatan peluang pasar/perdagangan produk IKM strategis. *Rekomendasi*: (a) Promosi melalui pameran, iklan media elektronik/cetak, dll; (b) Fasilitasi akses pasar; dan (c) Bantuan permodalan.
7. Penguatan kelembagaan. *Aksi*: (a) Pengembangan pola kemitraan (pelaku usaha agro-industri dengan pengusaha besar); (b) Kerjasama tekno-sosial-ekonomi intra-kelompok dan antar kelompok; dan (c) Peningkatan komunikasi (pembinaan) dan bimbingan (penyuluhan) dengan teknik diseminasi informasi dan representasi kelembagaan.

Pengembangan wilayah terluar Indonesia dipandang sangat strategis dengan memanfaatkan kearifan lokal yang telah diadopsi secara turun-temurun di berbagai wilayah perbatasan NKRI dengan negara tetangga. Pemetaan kemampuan wilayah yang strategis adalah pilihan yang logis untuk segera dapat dilaksanakan untuk mempercepat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Reorientasi tujuan pengembangan produk strategis harus mampu meningkatkan daya saing produk yang bersangkutan dan sekaligus bernilai ekonomi tinggi. Kelompok petani yang juga perajin serat pisang abaka yang hingga kini terus bertahan membutuhkan berbagai sentuhan kebijakan, teknologi, dan pengembangan lainnya. Implikasi kebijakan yang perlu



dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh para pengambil keputusan di tingkat pusat maupun daerah (kabupaten) mencakup beberapa prioritas perhatian, diantaranya:

- a. Kebutuhan bahan baku dan tersedia sepanjang waktu dengan volume, waktu, dan tempat yang tepat.
- b. Keperluan membantu para pelaku usaha untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan internal dalam berproduksi, menganalisis, mengatasi dan mengambil solusi terbaik. Disamping itu, perlu dikenali berbagai peluang yang tersedia dan memanfaatkannya secara logis, bertahap dan terorganisasi.
- c. Perkuatan para pelaku usaha perlu secara berkelompok dengan berbagai program, seperti budidaya, teknik/proses produksi, pemasaran/perdagangan dan manajemen usaha.
- d. Ketersediaan berbagai instrumen kebijakan yang langsung terkait dengan proses produksi dan pemasaran diperlukan dalam kerangka percepatan pengembangan sentra komoditas pisang abaka, termasuk ketersediaan bahan baku, aplikasi inovasi dan teknologi, kegiatan promosi dan perdagangan, teknik pengemasan.
- e. Kebutuhan fasilitasi yang sesuai dengan kebutuhan para petani/perajin, harmonisasi peraturan di pusat dan daerah, serta sinergi program dan kegiatan untuk membangun sentra produk strategis yang berdaya saing secara berkesinambungan.
- f. Kebutuhan membangun komunikasi dan interaksi dengan berbagai pihak terkait dan merumuskan berbagai upaya (program dan kegiatan) pengembangan produk strategis (pisang abaka) melalui pendekatan *public-private partnerships*.

Desain yang lebih rinci dan operasional untuk memetakan pengembangan produk pertanian strategis dalam bentuk matriks aksi untuk uji coba (*pilot project*) disarankan untuk dirancang dan disiapkan mengikuti rekomendasi seperti diuraikan dalam tabel matriks berikut (Tabel 3). Keterlibatan semua pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah (kabupaten yang berkoordinasi dengan tingkat provinsi) harus dapat bersinergi dengan inisiatif kegiatan datang dari tingkat pusat (level Kementerian Pertanian). Dari komunikasi yang dibangun diharapkan dapat tercipta kerjasama yang produktif untuk segera meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani/perajin di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud.

PENGUATAN KELEMBAGAAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING KOMODITAS STRATEGIS WILAYAH

Kelembagaan pertanian di perdesaan adalah aset yang sangat berharga yang menggerakkan pembangunan pertanian menurut program dan kegiatan yang ditetapkan. Sebagai sebuah lembaga, kelompok tani harus kuat dan mampu melaksanakan kegiatan langsung di lapangan. Penguatan kelompok tani menjadi strategis untuk mencapai tujuan program dan sekaligus mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat tani melampaui kondisi saat ini.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pendekatan kemitraan (PPP) untuk banyak program (pusat maupun daerah) dinilai perlu terus dikembangkan untuk mempercepat pembangunan pertanian di daerah. Pendekatan OVOP atau pembangunan pertanian berbasis kawasan semua bermuara pada adanya kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan dan merujuk pada kerjasama yang saling menguntungkan dalam pola PPP.

Tabel 3. Strategi Percepatan Pengembangan Agro-Industri Strategis di Kabupaten Kepulauan Talaud: **Pisang Abaka**

Nama Sentra Agro-industri	Strategi Percepatan Pengembangan	Desain Operasional dan Bantuan Teknis	Bantuan Kelembagaan dan Kebijakan
Sentra Produk Strategs Pisang Abaka	<p>Hasil analisis dengan menggunakan metoda SWOT menunjukkan bahwa pengembangan komoditas pisang abaka pada strategi S-O (<i>strength and opportunity</i>) berada di posisi kuadran I yang berarti bahwa strategi percepatan pengembangan produk ini mencakup pemanfaatan kesempatan yang ada secara konsisten dan berkesinambungan terhadap sumber daya yang tersedia dengan mengandalkan kekuatan sendiri hingga mampu meraih hasil yang lebih optimal. Kekuatan yang perlu diperhatikan, ditingkatkan dan dikembangkan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perluasan lahan tanam. Mendorong pemasaran input usahatani untuk digunakan dalam budidaya/produksi batang pisang. Pengolahan bahan baku lebih lanjut menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Memanfaatkan peluang permintaan pasar domestik dan global. Meningkatkan akses ke lembaga pembiayaan untuk membantu permodalan/kredit. Menjalin kemitraan ekonomi dengan pihak ketiga (perusahaan yang bersedia membantu petani/perajin pisang abaka). 	<p>Secara operasional, bantuan yang dibutuhkan mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuka areal tanam baru (ekstensifikasi) Mendukung ketersediaan input usahatani dan teknik aplikasinya untuk budidaya Melaksanakan pelatihan pengolahan untuk memperoleh nilai tambah (<i>added value</i>) Menyiapkan strategi pemasaran: informasi pasar (<i>market intelligence</i>) dan distribusi produk IKM berkualitas Menyediakan modal kerja/modal usaha Memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif untuk menjalin kerjasama dengan pola kemitraan (<i>partnerships</i>) 	<p>Dukungan kelembagaan diharapkan dari instansi/lembaga terkait, diantara yang sangat dibutuhkan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemusatan perhatian dinas atau instansi yang mengurus kepentingan pertanian/budidaya Mengidentifikasi lokasi pengembangan pertanaman (budidaya) Mengintensifkan komunikasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pengembangan produk pertanian Menyediakan fasilitas untuk usaha, peraturan, dan instrumen kebijakan lain yang memungkinkan pengembangan produk pertanian strategis, termasuk insentif, subsidi (jika ada), pelatihan/penyuluhan, peralatan/perengkapan teknik pengolahan, dll Membangun kerjasama antar instansi terkait dan merumuskan berbagai upaya (program dan kegiatan) pengembangan produk pertanian strategis (PPP).

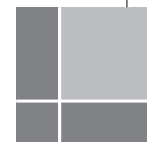
Sumber: Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, 2014 (diolah).

PPP membuka kesempatan alih teknologi, pengolahan yang menghasilkan produk bermutu/memiliki daya saing, dan manajemen usaha yang lebih baik. Hasil dari kerjasama ini adalah produk berkualitas yang memenuhi standar yang ditetapkan dengan peluang pasar yang menguntungkan. Bank Indonesia dalam publikasinya (www.bi.go.id) juga mendorong pengembangan pisang abaka dengan pola kemitraan terpadu. Pola inti plasma yang diusulkan melibatkan kegiatan ekonomi dengan mengelompokkan petani (plasma) kedalam bentuk koperasi untuk bertransaksi dengan perusahaan besar (inti).

Adanya kerjasama antar pihak yang memiliki ketergantungan dan diikat oleh kebutuhan untuk meningkatkan kinerja usaha, upaya peningkatan daya saing komoditas strategis wilayah menjadi relevan untuk dikembangkan. Bantuan teknologi tepat guna sangat dibutuhkan untuk mempercepat pengembangan komoditas strategis. Untuk pisang abaka, misalnya, hasil-hasil penelitian yang dilakukan berbagai pihak perlu dipertimbangkan penggunaannya. Warji (2002) mendesain mesin penyerat pisang abaka yang efisien. Dilaporkan bahwa mesin yang didesain ini mampu menyerat sekitar 600 kg bahan baku dalam sehari (8 jam) dengan hasil 20,2 kg serat. Meskipun memerlukan uji coba di lapangan dengan memperluas penggunaannya sebelum dimanfaatkan oleh petani, namun hasil penelitian ini menunjukkan prospek yang baik dimasa depan karena mesin-mesin tepat guna yang efisien dapat didesain, diproduksi dan digunakan di lapangan.

Pisang abaka yang terdapat di daerah perbatasan atau pulau terluar NKRI adalah salah satu contoh komoditas strategis yang dapat dikembangkan dan memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani/perajin di wilayah setempat. Pisang abaka yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Talaud, salah satu wilayah terluar NKRI (berbatasan dengan Filipina) memiliki potensi pengembangan serat pisang abaka yang menggembirakan. Syaifullah (2006) melaporkan bahwa budidaya pisang abaka di wilayah Essang (Kecamatan Essang) memiliki potensi yang besar dan masyarakat Essang memiliki harapan peningkatan pendapatan dari pengembangan komoditas strategis ini. Namun demikian, perencanaan pengembangan dengan melibatkan berbagai kelembagaan terkait masih diperlukan untuk mensinergikan seluruh potensi yang ada di wilayah ini. Berdasarkan hasil penelitian, diantara upaya menguatkan kelembagaan seperti kelompok tani/perajin serat pisang abaka dapat disarankan seperti diuraikan berikut ini:

- a. Penyediaan modal kerja: Harus diakui bahwa sebagian besar petani tidak dapat mengakses lembaga keuangan resmi/bank karena tidak memiliki agunan yang cukup menurut persyaratan perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan lembaga penyedia dana alternatif yang tidak memerlukan persyaratan agunan, namun didukung oleh kekuatan sosial dengan kearifan lokal yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A) yang saat ini berada dibawah Gapoktan dan berkedudukan perdesaan dapat didorong untuk menyediakan kebutuhan modal kerja para petani/perajin dengan dukungan penuh pemerintah (pusat dan daerah). Dukungan tersebut antara lain dengan menyediakan fasilitas kredit berbunga rendah (subsidi bunga), menguatkan LKM-A dengan menyediakan modal usaha, dan mengintegrasikan kegiatan pembiayaan dengan program pembangunan pertanian dibawah kendali LKM-A.
- b. Pelaksanaan pelatihan: Pada umumnya petani membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan. Peningkatan kapasitas petani tidak hanya melalui pelatihan tetapi juga dengan memberikan kunjungan ke lokasi lain untuk memberikan kesempatan bertukar informasi dengan petani mitranya.



- c. Penyediaan alat dan mesin pertanian: Alsintan diperlukan diantaranya untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Peningkatan kualitas berimplikasi peningkatan daya saing produk yang bersangkutan. Disamping itu, kehadiran dan penggunaan alsintan akan sekaligus memudahkan kegiatan pengolahan yang dilakukan petani atau kelompok tani. Dalam kasus pisang abaka misalnya, ketersediaan mesin penyerat untuk memperoleh serat halus atau kasar sangat diperlukan. Menghasilkan serat dapat dilaksanakan petani secara berkelompok dan menjadi bahan baku untuk membuat produk antara atau produk jadi lainnya. Fasilitas alsintan diharapkan dapat disediakan melalui kerjasama kemitraan antara petani (kelompok tani) dengan pihak lain (perusahaan besar) dan didukung oleh (instrumen) kebijakan pengembangan komoditas pisang abaka (pemerintah daerah).

PENUTUP

Penguatan lembaga ekonomi perdesaan, khususnya kelompok tani dipandang sangat strategis untuk keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian. Secara spesifik, peran serta para pihak dalam pengembangan komoditas strategis di wilayah perbatasan/pulau terluar sangat diharapkan, khususnya melalui penguatan kelembagaan melalui pendekatan kemitraan (PPP) untuk meningkatkan daya saing komoditas tersebut.

Pendekatan kemitraan yang dilaksanakan di Indonesia melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diduga akan semakin berkembang dan mencakup banyak bidang usaha. Dengan landasan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN (No: Kep-216/M-PBUMN/1999, tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN; dan No: Kep-236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang kemudian diperbarui dengan menerbitkan keputusan No: Per-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007) akan banyak usaha kecil dan menengah yang berpeluang mengembangkan usaha atas azas kerjasama ekonomi dengan perusahaan besar, atau setidaknya dengan memanfaatkan pendanaan yang disediakan oleh usaha besar. Inisiatif perusahaan besar dengan memanfaatkan Program PKBL diharapkan dapat memberikan insentif kegiatan ekonomi bagi usaha kecil dan menengah, termasuk dengan mengembangkan komoditas strategis di wilayah perbatasan NKRI yang berpotensi menguasai pasar lokal serta mampu menembus pasar regional dan global.

Penguatan kelembagaan ekonomi di perdesaan melalui program kemitraan diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan secara lokal, namun memiliki daya saing untuk berkompetisi dengan produk sejenis yang berasal dari negara lain. Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah didepan mata, kemampuan produk dalam negeri untuk berkompetisi di pasar regional sangat membutuhkan peran kelembagaan yang kuat, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Revitalisasi kemitraan agribisnis yang menonjolkan saling percaya dan kejujuran perlu dikembangkan pada berbagai komoditas strategis. Kemitraan tersebut bukan hanya sekadar kerjasama ekonomi dengan pola inti-plasma yang harus mematuhi aturan formal yang sengaja dibentuk, namun lebih pada kerjasama yang saling membutuhkan dengan kebersamaan yang erat (Darwis, *et al.*, 2006).

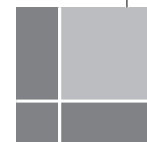
"Desk pengembangan produk pertanian strategis di wilayah perbatasan" disarankan dapat segera dibentuk pada tingkat eselon satu terkait, dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian. *Desk* ini dimaksudkan sebagai bagian struktur organisasi non permanen/*ad hoc* (bersifat sementara) yang kegiatannya diarahkan pada perencanaan pengembangan produk pertanian strategis di wilayah terluar/perbatasan NKRI yang potensial



untuk dikembangkan. Fokus kegiatan *desk* ini adalah memetakan seluruh potensi produk pertanian strategis (unggulan, utama, andalan) dan menyiapkan desain perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan operasional pengembangan di seluruh wilayah perbatasan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa Pura. 2012. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan: Dasar Hukum Pengelolaan PKBL. <http://www.angkasapura1.co.id/pkbl/?q=content/dasar-hukum-pengelolaan-pkbl> (30 November 2015).
- Bank Indonesia. (tanpa tahun publikasi). Pola Pembiayaan Usaha Kecil: Perkebunan Pisang Abaka. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM. Bank Indonesia. Jakarta. <http://www.bi.go.id/id/umkm/kelayakan/pola-pembiayaan/perkebunan/Documents/582885cae1ea485aa57ce18ea0ec1d10PerkebunanKaretRakyat.pdf> (30 November 2015).
- Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian. 2012. Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Laporan Teknis. Kementerian Pertanian. 2012.
- Bisnis Indonesia. 2012. Industri Harus Pacu Daya Saing. www.kemenperin.go.id (3 November 2012).
- Calestous, J. 2012. *Preface: Building trust in agricultural biotechnology partnerships*. Agriculture & Food Security 1 (Suppl 1):I1. <http://www.agricultureandfoodsecurity.com/content/1/S1/I1> (18 Januari 2015).
- Darwis, V., E.L. Hastuti, dan S. Friyatno. 2006. *Revitalisasi Kelembagaan Kemitraan Usaha Dalam Pembangunan Agribisnis Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara*. Forum Agro Ekonomi 24 (2): 123-134.
- Dick, W.J.A. and W. Wang. 2010. *Government interventions in agricultural insurance*. Agric. and Agric. Sci. Procedia 1: 4-12. Elsevier B.V.
- Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian. 2014. Pemetaan Sentra IKM di Daerah Perbatasan (Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara). Laporan Hasil Kajian. Kementerian Perindustrian. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian. 2009. Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pengembangan IKM Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product - OVOP*). Kementerian Perindustrian. Jakarta.
- Frank, H., J. Tola, A. Engler, C. González, G. Ghezan, J. M. P. Vázquez-Alvarado, J. A. Silva, J. de Jesús Espinoza, and M. V. Gottret. 2007. Building Public-Private Partnerships for Agricultural Innovation. IFPRI. Washington, DC.
- Ferroni, M. and P. Castle. 2011. Public-Private Partnerships and Sustainable Agricultural Development. *Sustainability* 3: 1064-1073; doi:10.3390/su3071064. Open Access Sustainability ISSN 2071-1050. www.mpd.com/journal/sustainability. (18 Februari 2015).
- International Fund for Agricultural Development. 2013. IFAD and Public-Private Partnerships: Selected Project Experiences. IFAD. Rome.
- Irawan, B. 2015. Regional-based Agricultural Development. Agro-Socioeconomic Newsletter 8: 2 (August 2015).



- Kapoor, R.D. 2007. PPP: Institutional and Industrial Views. *In: Ayyappan, S., P. Chandra, and S.K. Tandon (Eds.) Agricultural Transformation through Public Private Partnership: An Interface.* Indian Council of Agricultural Research. New Delhi.
- Marantina, P.G. 2013. Laba Budidaya Pisang Penghasil Serat, Tidak Seret. Kontan.co.id. <http://peluangusaha.kontan.co.id/news/laba-budidaya-pisang-penghasil-serat-tak-seret-1> (30 November 2015).
- Mola, T. 2012. Serat Pisang Abaka, Potensi Bisnis Menggiurkan di Perbatasan Sulut. *Bisnis Indonesia.* Edisi Kamis, 6 Februari 2014. <http://entrepreneur.bisnis.com/read/20140206/263/201557/serat-pisang-abaka-potensi-bisnis-menggiurkan-di-perbatasan-sulut>. 19 Oktober 2015.
- Pasaribu, S.M. 2010. *Developing rice insurance farm insurance in Indonesia.* *Agric. and Agric. Sci. Procedia* 1: 33-41. Elsevier B.V.
- Ponnusamy, K. 2013. *Impact of public private partnership in agriculture: A review.* *The Indian J. of Agr. Sci.* 83(8). <http://epubs.icar.org.in/ejournal/index.php/IJAgS/article/view/31981>. (18 Februari 2015).
- Purnaningsih, N. 2007. *Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan.* *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia* 1 (3): 393-416.
- Syaifullah, A. 2006. Pisang Abaka, Tumpuan Masyarakat Essang. http://www.indosiar.com/ragam/pisang-abaka-tumpuan-masyarakat-essang_53867.html (30 November 2015).
- Thomas, O. 2014. Peluang Bisnis: Serat Pisang Abaka, Potensi Usaha di Daerah Perbatasan. <http://sulawesi.bisnis.com/read/20140206/15/175536/peluang-bisnis-serat-pisang-abaka-potensi-usaha-di-daerah-perbatasan> (30 November 2015).
- Umali-Deininger, D. 1997. *Public and Private Agricultural Extension: Partners or Rivals? The World Bank Research Observer* 12(2): 203-224. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- UMKMJogja. 2014. Budidaya Pisang Abaca. <http://umkmjogja.com/budidaya-pisang-abaca-part-ii.html> (30 November 2015).
- Warji. 2002. Desain dan Uji Performansi Mesin Penyerat Pisang Abaka (Musa Textilir, Nee). IPB Repository. Bogor. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/16318> (30 November 2015).
- Yuswiyanto, A. 2013. Serat Pisang Abaca Simulue Sangat Bagus untuk Bahan Kertas. Direktorat Jenderal Industri Agro. Jakarta. <http://agro.kemenperin.go.id/1674-Serat-Pisang-Abaca-Simeulue-Sangat-Bagus-untuk-Bahan-Kertas> (30 November 2015).

